



Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat

Michael Albert Baransano¹, Eka Intan Kumala Putri², Noer Azam Achzani³
dan Lala Kolopaking⁴

[Diterima: 16 Februari 2016; disetujui dalam bentuk akhir: 20 Juni 2016]

Abstrak. Pembangunan ekonomi di Indonesia terbagi kedalam sembilan sektor dan membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga pemerintah (terutama pemerintah daerah) perlu menetapkan sektor-sektor yang dapat diharapkan menjadi faktor pendorong bagi sektor lain agar berkembang menjadi penggerak utama pembangunan dalam mengurangi ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan mengkaji tingkat ketimpangan pembangunan antar dan di dalam wilayah di Provinsi Papua Barat tahun 2005-2013, serta bagaimana implementasi peran dari sektor unggulan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Indeks Theil, Location Quotient dan Shift Share Analysis menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi disebabkan oleh ketimpangan di dalam wilayah pengembangan dan dipengaruhi oleh kabupaten Teluk Wondama, Sorong, Raja Ampat dan Fak-Fak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan PDRB Papua Barat selama periode 2005-2013. Kami juga menemukan dan merekomendasikan bahwa sektor-sektor unggulan di setiap kabupaten/kota merupakan salah satu strategi alternatif bagi pemerintah daerah dalam memulai suatu perencanaan pembangunan, dimana keunggulan komparatif dan kompetitif dari sektor-sektor tersebut dapat berperan sebagai “mesin pertumbuhan” dalam mengurangi ketimpangan pembangunan.

Kata kunci. Ketimpangan wilayah, sektor-sektor unggulan, provinsi papua barat

[Received: 16 February 2016; accepted in final version: 20 June 2016]

Abstract. The economic development in Indonesia is divided into nine sectors and therefore requires a huge investment. As a result, the government (particularly local government) needs to determine the sectors that are expected to become push factors for other sectors to develop as the prime mover of development in reducing regional disparity. This paper aims to assess the level of developmental disparity between and within the regions of the Province of West Papua from 2005 to 2013, as well as the implementation of the role of the leading sector on the disparity of regional development. The research uses Theil Index, Location Quotient, and Shift Share Analysis approaches and shows that developmental disparity existed as the result of disparity in development regions and is affected by Teluk Wondama, Sorong, Raja Ampat and Fak-Fak regencies. In addition, the result shows that the agricultural sector has the largest

¹ Fakultas Pertanian Universitas Papua Manokwari, email: baransano_michael@yahoo.com

² Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

³ Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

⁴ Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

influence on the GDP of West Papua over the period of 2005 to 2012. The study also found and recommends that leading sectors in each regency/municipality are an alternative strategy for local government to start development planning, where comparative and competitive advantages of those sectors can play the role of an “engine of growth” in reducing disparities.

Keywords. *regional disparities, leading sectors, West Papua Province.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Proses pembangunan dalam skala nasional yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan masalah pembangunan yang cukup besar dan kompleks. Pendekatan pembangunan nasional yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan-kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah *hinterland* mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan. Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai sebagai bangsa. Kecenderungan ketimpangan regional yang tinggi antara wilayah maju dan wilayah berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan pembangunan ekonomi (Williamson, 1965; Yemtsov, 2005; Elbers et al., 2005; Kay et al., 2007), situasi politik dan desentralisasi fiskal (Lessmann, 2011; Swastyardi, 2008), masalah aksesibilitas (Hu, 2002), faktor diskriminasi etnik dan kegagalan pasar seperti *excessive migration* (Mills and Ferranti, 1971; Boadway and Flatters, 1982; Ascani et al., 2012), serta konsentrasi sumberdaya alam Venables (2003). Lessmann (2011) selanjutnya mengatakan bahwa isu ketimpangan regional sangat terkait erat dengan pembangunan ekonomi, dimana negara-negara berkembang memiliki tingkat ketimpangan regional yang lebih tinggi dibanding dengan negara-negara maju, selain itu ketimpangan pembangunan wilayah selalu bervariasi antar negara sepanjang waktu, dengan demikian sangat penting melakukan investigasi terhadap faktor-faktor penyebabnya.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda, karena itu tidaklah mengherankan bila mana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat disebabkan karena aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008). Menurut Rauch et al., (2001), ketimpangan yang menyebabkan kemiskinan terjadi karena adanya *gap* antara sistem yang berlaku di suatu wilayah dari *service provider* dengan masyarakatnya. Selain itu menurut Sodik dan Nuryadin (2005), ketimpangan yang disebabkan karena *country risk* tidak identik dengan *regional risk*, karena resiko lokal tidak dapat dipandang sama dengan resiko makro-nasional. Hal ini terbukti ketika pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia mengalami kontraksi sebesar -13% pada tahun 1998, terbukti perekonomian Provinsi Papua tumbuh sebesar 12,7% dan Batam dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%.

Sejak bergulirnya otonomi daerah di Indonesia, terlebih lagi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paradigma baru pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membawa pengaruh yang cukup luas dan signifikan dalam tata kehidupan masyarakat baik di tingkat regional dan lokal. Wujud otonomi daerah adalah undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara harfiah otonomi daerah berarti hak, wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh urusan pemerintahan didesentralisasikan kepada daerah-daerah kecuali yang menyangkut hubungan luar negeri serta pertahanan dan keamanan, selain itu daerah juga memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya. Kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut diberikan kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keberagaman daerah. Swastyardi (2008) mengatakan bahwa desentralisasi, khususnya bagi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan beragam suku bangsa akan memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan ekonominya, karena para pengambil keputusan akan lebih memahami masalah pembangunan daerahnya secara langsung sehingga lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Masalah

Provinsi Papua Barat adalah wilayah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, awalnya bernama Irian Jaya Barat, merupakan provinsi ke-33 di Indonesia, berdiri atas dasar undang-undang nomor 45 tahun 1999. Luas wilayah Provinsi Papua Barat mencapai 97.407,61 km² (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008) terdiri dari 12 kabupaten dan 1 (satu) kota, 162 distrik dan 1.392 kampung. Persentase luas wilayah dan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Fakfak	11.036,48	11,37	70.902	8.56
2	Kaimana	16.241,84	16,74	51.100	6.17
3	Teluk Wondama	3.959,53	4,08	28.534	3.44
4	Teluk Bintuni	20.840,83	21,48	56.597	6.83
5	Manokwari	8.664,76	8,93	150.179	18.13
6	Sorong Selatan	3.946,94	4,07	41.085	4.96
7	Sorong	7.415,29	7,64	76.669	9.26
8	Raja Ampat	8.034,44	8,28	44.568	5.38
9	Tambrau	5.179,65	5,34	13.376	1.61
10	Maybrat	5.461,69	5,63	35.798	4.32
11	Manokwari Selatan	2.812,44	2,90	20.916	2.53
12	Pegunungan Arfak	2.773,74	2,86	26.729	3.23
13	Kota Sorong	656,64	0,68	211.840	25.58
Papua Barat		97.024,27	100,00	828.293	100

Sumber : BPS Papua Barat, 2014

Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya bila dilihat dari aspek pendapatan (PDRB) terkait dengan kontribusinya terhadap PDRB

Provinsi Papua Barat. Secara spasial ke-empat wilayah tersebut memiliki aksesibilitas cukup tinggi karena berada pada jalur transportasi utama baik laut dan udara yang merupakan pintu masuk dan keluar ke Provinsi Papua Barat. Besarnya kontribusi ke-empat kabupaten/kota tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor perekonomian di Provinsi Papua Barat lebih banyak berkembang dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pembangunan (ketimpangan) pada kabupaten/kota sehingga akan menyebabkan terserapnya sumberdaya dari daerah *hinterland*.

Kabupaten Teluk Bintuni memberikan kontribusi terbesar dari total sektor-sektor perekonomiannya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat sebesar 5.999.444,21 (45,00%), disusul kemudian oleh Kabupaten Sorong sebesar 2.012.396,06 (15,09%), Kota Sorong sebesar 1.814.738,30 (13,61%) dan Kabupaten Manokwari sebesar 1.198.696,16 (8,99%). Kontribusi terendah sektor-sektor perekonomian terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat lebih banyak disumbangkan oleh kabupaten-kabupaten baru (pemekaran) yakni Kabupaten Tambrauw sebesar 35.816,13 (0,27%), Kabupaten Maybrat sebesar 93.996,82 (0,71%), Kabupaten Sorong Selatan sebesar 207.004,42 (1,55%) dan Kabupaten Teluk Wondama sebesar 210.380,16 (1,58%). Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari menikmati pendapatan per kapita yang lebih tinggi, angka kemiskinan yang lebih rendah, serta kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung meningkat.

Pembangunan di tanah Papua selayaknya dikembangkan secara lebih intensif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal dan sektor perekonomian (sektor basis dan non basis) yang berpotensi memberikan dampak positif bagi peningkatan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan di tanah Papua secara intentif didorong melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, seperti diketahui percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat merupakan kebijakan utama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga pada tahun 2015 diharapkan Provinsi Papua Barat bisa mengejar ketertinggalan dalam pencapaian pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) dari provinsi lain di Indonesia.

Provinsi Papua Barat sendiri dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah pengembangan untuk mempermudah akselerasi pembangunan wilayah berdasarkan kedekatan secara geografis dan aksesibilitas. Wilayah Pengembangan I meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Wilayah Pengembangan II meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, serta Wilayah Pengembangan III yang meliputi Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis:

- (1) Tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat selama 2005-2013
- (2) Sektor-sektor unggulan di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2005-2013

- (3) Peranan sektor-sektor unggulan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pembangunan dalam mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Papua Barat.

Tinjauan Literatur

Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah

Ketimpangan regional merupakan fenomena yang terjadi secara universal di semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya. Ketimpangan pembangunan merupakan masalah pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Pada banyak negara, distribusi pembangunan ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah-masalah baik sosial, ekonomi maupun budaya, sehingga hampir semua negara mengarahkan kebijakan pembangunannya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah (Todaro and Smith, 2009).

Menurut Rustiadi et al., (2009), faktor-faktor utama penyebab ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia adalah (1) geografi; pada wilayah yang cukup luas akan terjadi variasi spasial kualitas dan kuantitas sumberdaya mineral, sumberdaya pertanian, topografi, iklim, curah hujan dan sebagainya. Apabila faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan perkembangan wilayahnya lebih baik, (2) sejarah; tingkat perkembangan dari suatu masyarakat dalam suatu wilayah sangat tergantung pada apa yang telah dilakukan di masa lalu misalnya sebuah sistem yang memberikan kebebasan untuk bekerja dan berusaha akan mampu berkembang dengan lebih baik, (3) politik; instabilitas politik sangat mempengaruhi proses perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah, (4) kebijakan pemerintah; adanya dominasi pemerintah dalam semua aspek pembangunan ekonomi akan menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan pembangunan seperti yang dikemukakan juga oleh Kurian (2007). Sehingga Matsui (2005) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemerintah seharusnya memainkan peranan penting dalam mempromosikan aktivitas-aktivitas sektor swasta di dalam ekonomi regional suatu wilayah, (5) administrasi; dikemukakan oleh Kimura (2007) dalam penelitiannya bahwa marjinalisasi administrasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara menyebabkan ketimpangan yang tinggi dengan wilayah Gorontalo sehingga memacu pembentukan Provinsi Gorontalo. Wilayah yang administrasinya efisien akan mampu mengundang investasi, karena perijinan tidak selalu rumit sebaliknya daerah dengan kinerja administrasi buruk (*bottleneck bureaucracy*) tidak diminati investor, (6) sosial budaya; masyarakat yang tertinggal pada umumnya tidak memiliki institusi dan perilaku yang kondusif bagi berkembangnya perekonomian, (7) ekonomi; dikatakan bahwa faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah, diantaranya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : faktor ekonomi yang terkait dengan perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan, faktor ekonomi yang terkait dengan akumulasi dari berbagai faktor, faktor ekonomi yang terkait dengan pasar bebas dan pengaruhnya pada *spread effect* dan *backwash effect*, faktor ekonomi yang terkait dengan distorsi pasar seperti *immobility*, kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan keterampilan tenaga kerja dan sebagainya.

Terkait dengan pembangunan wilayah, setidaknya terdapat dua jenis konsep ketimpangan yang sering digunakan dalam studi-studi empiris, yang pertama adalah ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan (ketimpangan secara vertikal), biasanya diukur menggunakan Indeks Gini yang merupakan ukuran ketimpangan agregat dan angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Kedua, ketimpangan pembangunan antar wilayah (ketimpangan secara horisontal). Secara teoritis, permasalahan

ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan neo-klasik yang dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ukuran ketimpangan pembangunan wilayah yang digunakan adalah Indeks Williamson dan Indeks Theil, berbeda dengan Indeks Gini yang lazim digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan, Indeks Williamson dan Indeks Theil menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Dibandingkan dengan Indeks Williamson, penggunaan Indeks Theil sebagai ukuran ketimpangan wilayah memiliki keunggulan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan di dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisa menjadi lebih luas. Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting. Demikian pula dengan penafsirannya yaitu bila indeks mendekati satu artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati nol yang berarti ketimpangannya merata.

Sektor-Sektor Unggulan

Di Indonesia pembangunan ekonomi secara umum dibagi kedalam sembilan sektor dan untuk mengembangkan semua sektor tersebut secara bersamaan diperlukan investasi yang sangat besar. Jika modal (investasi) tidak cukup maka perlu ada penetapan prioritas pembangunan. Biasanya sektor yang mendapat prioritas tersebut adalah sektor unggulan yang diharapkan dapat mendorong (*push factor*) sektor-sektor lain untuk berkembang menjadi pendorong utama (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi wilayah. Sejalan dengan penentuan sektor unggulan suatu wilayah, James and Movshuk (2003) mengatakan bahwa keunggulan komparatif suatu wilayah dapat pula dipengaruhi oleh kedekatan ekonomi wilayah-wilayah tersebut. Selain itu Miranti, R. et al., (2013) mengatakan bahwa pemetaan sektor-sektor ekonomi potensial di tiap wilayah sangat penting untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan wilayah.

Secara garis besar Rustiadi et al., (2009); Tarigan (2005), mengemukakan bahwa sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu sektor basis (*leading sector*) dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Artinya industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar daerah/wilayah. Sedangkan sektor non basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar di daerahnya sendiri dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang.

Penentuan sektor unggulan dapat didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) *share* terhadap PDRB: suatu sektor dikatakan unggul jika memberikan kontribusi minimal 10%, sedangkan sub sektor minimal 2.5%, (2) nilai LQ (*location quotient*): sektor/sub sektor dikatakan unggul jika mempunyai nilai $LQ > 1$, (3) pertumbuhan PDRB: suatu sektor dikatakan unggul jika mengalami rata-rata pertumbuhan minimal 5% per tahun dan terus mengalami pertumbuhan positif setidaknya pada tiga tahun atau mengalami kenaikan pada dua tahun terakhir secara berturut-turut, (4) selisih antara pertumbuhan *share* sektor/sub sektor terhadap PDRB wilayah kajian dan wilayah yang lebih besar bernilai positif.

Metode LQ dan SSA (*shift share analysis*) merupakan dua metode yang sering dipakai sebagai indikator sektor basis. Metode LQ digunakan untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikasi sektor basis dan non basis serta merupakan perbandingan relatif antara

kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu wilayah. Asumsi dalam LQ adalah terdapat sedikit variasi dalam pola pengeluaran secara geografi dan produktifitas tenaga kerja seragam serta masing-masing industri menghasilkan produk atau jasa yang seragam. *Shift share analysis* (SSA) merupakan salah satu dari sekian banyak teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktivitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi cakupan wilayah yang lebih luas dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil SSA juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Hasil SSA juga mampu menjelaskan kinerja (*performance*) suatu aktivitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerja yang dihasilkan di dalam wilayah total.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meliputi keseluruhan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat kecuali Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak yang dikeluarkan dari analisis karena kedua wilayah tersebut merupakan kabupaten pemekaran baru (DOB) sehingga belum tersedia data statistiknya (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB per sektor dan jumlah penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik periode tahun 2005-2013, serta data sekunder lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan terkait dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Theil, *Location Quotient* dan *Shift Share Analysis* dengan penjelasan masing-masing alat analisis sebagai berikut:

Indeks Theil

Pada penelitian ini, ketimpangan pembangunan wilayah di Papua Barat dihitung menggunakan Indeks Theil, yang dikembangkan oleh Henry Theil, berguna ketika akan melakukan total ketimpangan yang terjadi antar wilayah (*between*) dan di dalam wilayah (*within*) masing-masing. Wilayah yang dimaksud adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Analisis dengan Indeks Theil dapat diketahui kabupaten/kota mana yang menyebabkan ketimpangan antar atau di dalam wilayah serta wilayah mana yang menjadi dampak dari ketimpangan tersebut. Selain itu dapat diketahui wilayah mana yang mengalami ketimpangan terbesar di dalamnya sendiri serta apa yang menyebabkannya. Formula Indeks Theil dapat ditulis sebagai berikut (Xu, et al., 2004) :

$$T = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{y_{ij}}{Y} \right) \log \left[\frac{\left(\frac{y_{ij}}{Y} \right)}{\left(\frac{n_{ij}}{N} \right)} \right] \quad (1)$$

Dimana :

- T = Total disparitas (Indeks Theil)
- y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i di provinsi j
- Y = Total PDRB per kapita di provinsi j
- n_{ij} = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- i di provinsi j
- N = Total penduduk
- i = Fak-Fak, Kaimana, Wondama, Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Kab. Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Tambrauw dan Kota Sorong
- j = Provinsi Papua Barat

Dekomposisi disparitas di dalam wilayah (*within*) dan antar wilayah (*between*) dianalisis dengan mengembangkan model disparitas total pada persamaan (1) di atas sehingga diperoleh total disparitas (T) = disparitas di dalam wilayah (T_w) + disparitas antar wilayah (T_B), sehingga model menjadi seperti pada persamaan (2) berikut:

$$T = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{y_{ij}}{Y} \right) \log \left[\frac{\left(\frac{y_{ij}}{Y} \right)}{\left(\frac{n_{ij}}{N} \right)} \right] = T_w + T_B \quad (2)$$

dimana:

$$T_w = \sum_i \left(\frac{y_i}{Y} \right) T_i; T_B = \sum_i \left(\frac{y_i}{Y} \right) \log \left[\frac{\left(\frac{y_i}{Y} \right)}{\left(\frac{n_i}{N} \right)} \right]$$

Sehingga persamaan (2) menjadi persamaan (3) berikut:

$$T = \sum_i \left(\frac{y_i}{Y} \right) T_i + \sum_i \left(\frac{y_i}{Y} \right) \log \left[\frac{\left(\frac{y_i}{Y} \right)}{\left(\frac{n_i}{N} \right)} \right] \quad (3)$$

Trend nilai dekomposisi indeks theil dihitung berdasarkan total nilai PDRB kabupaten/kota dan jumlah penduduk dari data tahun 2005-2013 berdasarkan atas harga konstan tahun 2010.

Location Quotient

Secara umum metode ini digunakan untuk menunjukan lokasi pemusatan/basis suatu aktivitas dan dapat mengidentifikasi sektor unggulan atau keunggulan komparatif suatu wilayah. *Location quotient* (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah.

Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktivitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama. Persamaan dari LQ (Bendavid-Val, 1991; Rustiadi et al., 2009) adalah:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{X_{.j}/X_{..}} \quad (4)$$

Dimana :

- X_{ij} = derajat aktivitas sektor perekonomian ke-j di kabupaten/kota ke-i
- X_i = total aktivitas sektor perekonomian di kabupaten/kota ke-i
- $X_{.j}$ = total aktivitas sektor perekonomian ke-j di Provinsi Papua Barat
- $X_{..}$ = derajat aktivitas total sektor perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
- j = pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan dan konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa
- i = Fak-Fak, Kaimana, Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Tambrau, Kota Sorong

Hasil analisis LQ akan menunjukan hal sebagai berikut:

1. Jika nilai $LQ_{ij} > 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih besar dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah atau aktivitas ke-j merupakan aktivitas/sektor unggulan di sub wilayah ke-i
2. Jika nilai $LQ_{ij} < 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah atau aktivitas ke-j bukan merupakan aktivitas/sektor unggulan di sub wilayah ke-i
3. Jika nilai $LQ_{ij} = 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa setara dengan aktivitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah.

Analisis dengan menggunakan LQ akan dapat diketahui sektor-sektor perekonomian yang merupakan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Shift Share Analysis

Shift share analysis (SSA) merupakan salah satu teknik analisis untuk melihat potensi produksi sektoral dari suatu kawasan/wilayah tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil SSA akan menjelaskan kemampuan berkompetisi aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah yang lebih luas (keunggulan kompetitif). Hasil analisis SSA akan diperoleh gambaran kinerja aktivitas Provinsi Papua Barat yang dapat dijelaskan dari tiga komponen hasil analisis berikut:

- a. Komponen laju pertumbuhan total (komponen *share*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah di Provinsi Papua Barat pada dua titik waktu (2009 dan 2012) yang menunjukan dinamika total wilayah tersebut.
- b. Komponen pergeseran proporsional (komponen *proportional shift*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktivitas tertentu secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam Provinsi Papua Barat.
- c. Komponen pergeseran diferensial (komponen *differential shift*). Komponen ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi suatu aktivitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktivitas tersebut dalam Provinsi Papua Barat. Komponen ini menggambarkan

dinamika (keunggulan/ketidakeunggulan) suatu sektor tertentu di kabupaten/kota tertentu terhadap sektor tersebut di kabupaten/kota lain.

Persamaan dari SSA (Bendavid-Val, 1991) adalah :

$$SSA = \underbrace{\left(\frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} - 1 \right)}_a + \underbrace{\left(\frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} - \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} \right)}_b + \underbrace{\left(\frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} \right)}_c \quad (5)$$

dimana :

a = Komponen *share*

b = komponen *proportional shift*

c = Komponen *differential shift*

$X_{..}$ = Nilai total sektor dalam provinsi papua barat

$X_{i..}$ = Nilai total sektor tertentu (9 sektor)

X_{ij} = Nilai sektor tertentu dalam kabupaten/kota ke-i di Provinsi Papua Barat

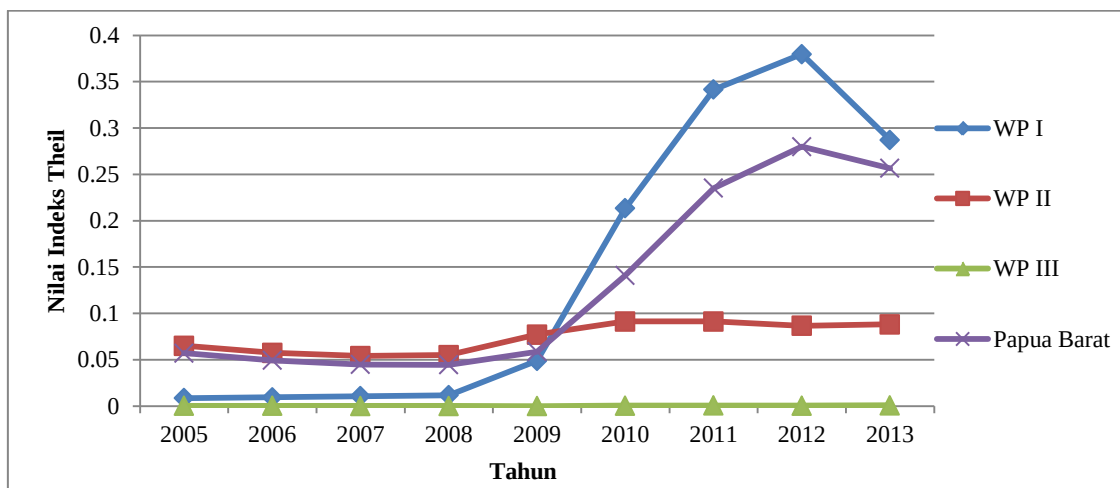
t_1 = Tahun 2012

t_0 = Tahun 2009

Hasil Analisis dan Pembahasan

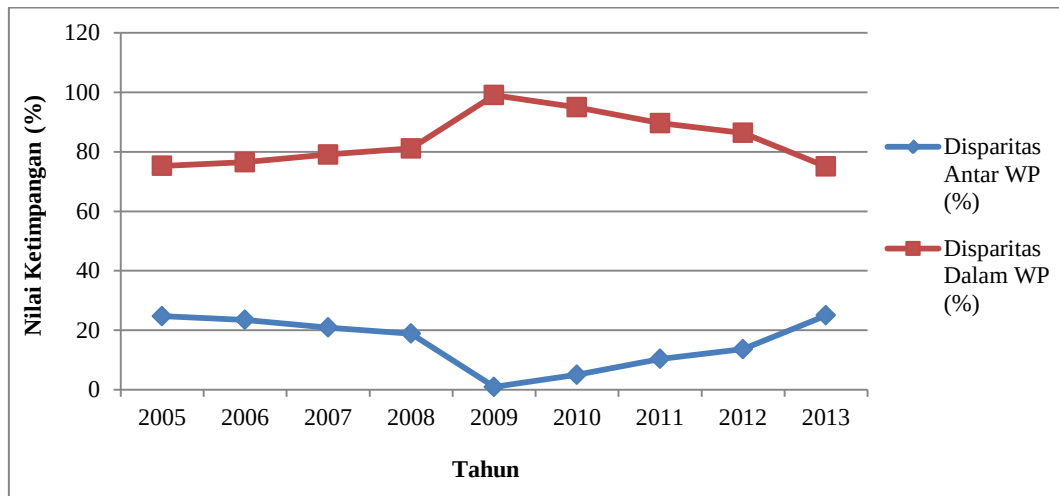
Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat

Analisis tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah dan di dalam wilayah di Provinsi Papua Barat diketahui melalui nilai Indeks Theil yang dihitung menggunakan rumus pada Persamaan (5) di atas dengan bantuan Microsoft Excel 2010. Hasil analisis Indeks Theil dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Trend nilai Indeks Theil tahun 2005-2013

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa ketimpangan total di Provinsi Papua Barat selama periode 2005-2013 cenderung mengalami peningkatan dimana hasil terlihat bahwa ketimpangan total di Papua Barat lebih banyak dipengaruhi oleh ketimpangan di dalam Wilayah Pengembangan (Gambar 3).



Gambar 3. Total Ketimpangan di Dalam dan Antar Wilayah Pengembangan

Ketimpangan terbesar di dalam Wilayah Pengembangan (WP) terjadi pada WP I dan WP II, pada WP I trend kontribusi terbesar terhadap ketimpangan di dalam WP dipengaruhi oleh Kabupaten Teluk Wondama sedangkan pada WP II dipengaruhi oleh Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di WP I dan WP II diikuti pula dengan ketimpangan yang tinggi, disebabkan karena Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah penyuplai sumberdaya (*hinterland*) bagi Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni di WP I, serta Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat di WP II. Kemajuan pembangunan ekonomi pada kabupaten/kota tersebut menyebabkan *backwash effect* yang lebih besar bagi daerah sekitarnya dibandingkan *spread effect*.

Pada WP III cenderung menunjukkan tingkat pembangunan dan ketimpangan yang konstan antar kabupaten selama periode 2005-2013. Namun demikian kontribusi terhadap ketimpangan pembangunan pada WP III tersebut dipengaruhi oleh Kabupaten Fak-Fak yang merupakan wilayah *hinterland* bagi Kabupaten Kaimana. Secara keseluruhan, kabupaten/kota yang mempengaruhi peningkatan ketimpangan pembangunan di Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Fak-Fak.

Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan di Provinsi Papua Barat

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pembangunan adalah mengetahui sektor-sektor unggulan daerah. Sektor unggulan (*leading sector*) merupakan sektor yang diharapkan menjadi motor perekonomian (*engine growth*) suatu wilayah. Identifikasi terhadap sektor unggulan yang dimiliki daerah, diharapkan terdapat efek yang positif terhadap kemajuan aktivitas perekonomian bagi pembangunan wilayah. Analisis LQ dan SSA dapat digunakan sebagai kombinasi untuk menentukan posisi sektor-sektor perekonomian yang merupakan sektor unggulan (sektor basis) dan non basis serta bagaimana tingkat pertumbuhan maupun tingkat kompetitif dari sektor-sektor perekonomian tersebut di Provinsi Papua Barat.

Tabel 2. Rata-Rata Nilai Analisis LQ Per Sektor di Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2005-2013

WP	Kabupaten/ Kota	Sektor Perekonomian								
		Pertanian	Pertambangan/ Penggalan	Industri Pengolahan	Listrik Gas dan Air Bersih	Bangunan/ Kontruksi	Perdagangan, Hotel Restoran	Angkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Jasa-Jasa
I	Manokwari	1.28	0.13	0.18	1.78	2.24	1.38	1.60	2.06	1.99
	Wondama	3.32	0.03	0.05	0.19	0.99	0.58	0.25	0.73	0.55
	Bintuni	1.36	0.13	1.48	0.13	0.86	0.23	0.13	0.31	0.66
II	Kota Sorong	0.59	0.07	0.96	2.69	1.16	2.66	2.97	2.75	1.04
	Sorong	0.63	3.00	1.44	0.22	0.35	0.25	0.19	0.11	0.85
	Sorong Selatan	1.96	0.12	0.03	1.87	2.20	1.47	0.92	0.55	1.41
	Raja Ampat	1.52	3.64	0.01	0.10	0.47	0.28	0.22	0.09	0.49
	Maybrat	3.09	0.01	0.01	0.65	1.60	1.94	0.31	0.22	1.24
	Tambrau	3.24	0.25	0.01	0.26	1.38	0.41	0.53	0.18	2.02
III	Fak-Fak	1.23	0.12	0.31	1.66	2.02	1.69	1.58	1.51	2.03
	Kaimana	2.18	0.06	0.53	0.93	1.20	1.31	1.01	0.74	0.93
Rata-Rata Provinsi		1.91	0.83	0.56	1.11	1.44	1.23	1.03	1.01	1.29

Hasil perhitungan LQ dengan menggunakan Persamaan (4) di atas diketahui bahwa sektor-sektor perekonomian di Papua Barat yang merupakan unggulan (komparatif) di tiap kabupaten/kota selama periode 2005-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian secara keseluruhan dalam periode 2005-2013 masih merupakan sektor andalan pembangunan wilayah di Papua Barat dengan nilai LQ sebesar 1.91 artinya bahwa pembentukan PDRB Papua Barat selama periode tersebut masih didominasi oleh sumbangsih dari sektor pertanian yang tersebar merata di keseluruhan wilayah kabupaten kecuali Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang memiliki nilai $LQ < 1$. Disusul kemudian oleh sektor bangunan/konstruksi (1.44), sektor jasa-jasa (1.29), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1.23), sektor listrik, gas dan air bersih (1.11), sektor angkutan dan komunikasi (1.03) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1.01. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor-sektor perekonomian yang memiliki nilai $LQ > 1$ pada Tabel 2 di atas berpotensi menjadi sektor unggulan (*leading sektor*) yang dapat dikembangkan sebagai *prime mover* perekonomian di Provinsi Papua Barat, seperti diketahui bahwa beberapa kabupaten/kota memiliki lebih dari satu sektor perekonomian yang berpotensi menjadi sektor unggulan.

Kriteria lain untuk menentukan suatu sektor merupakan sektor unggulan adalah kemampuannya untuk bersaing dengan sektor yang sama dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Pergeseran struktur aktivitas di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dalam dua titik waktu (2009 dan 2012) atau dengan melakukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Papua Barat maka salah satu teknik analisisnya menggunakan *shift share analysis* seperti pada Persamaan (5) di atas.

Tabel 3. Nilai *Shift Share Analysis* di Provinsi Papua Barat Dua Titik Tahun yakni 2009 dan 2012

WP	Kabupaten/ Kota	Nilai <i>differential shift</i> Per Sektor								
		Pertanian	Pertambangan/ Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik Gas dan Air Bersih	Bangunan/ Kontruksi	Perdagangan, Hotel Restoran	Angkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Jasa-Jasa
I	Manokwari	-0.39	0.36	-3.60	-0.11	0.06	0.09	-0.10	-0.04	-0.10
	Wondama	0.08	0.14	-3.50	0.38	-0.18	-0.07	-0.10	-0.17	0.32
	Bintuni	0.04	9.40	7.05	-0.15	-0.09	-0.10	-0.17	-0.06	0.08
		-0.27	9.90	6.95	0.12	-0.21	-0.08	-0.37	-0.27	0.30
II	Kota Sorong	0.05	-0.01	-3.42	0.13	-0.01	-0.06	0.08	-0.03	-0.16
	Sorong	0.10	-0.06	-3.61	-0.07	0.02	-0.13	-0.08	0.07	0.12
	Sorong Selatan	0.07	0.12	-3.40	0.02	0.22	-0.09	-0.30	0.88	-0.15
	Raja Ampat	0.12	-0.30	-3.42	-0.01	0.17	-0.02	0.03	1.03	0.13
	Maybrat	0.18	0.09	-3.65	-0.02	-0.10	-0.04	-0.22	0.32	-0.15
	Tambrau	0.84	1.91	-2.92	3.77	2.70	2.89	0.79	9.87	0.21
		1.36	1.75	-20.4	3.82	3.00	2.55	0.3	12.14	0.00
III	Fak-Fak	0.09	0.20	-3.60	-0.26	-0.12	0.18	-0.10	0.12	0.01
	Kaimana	0.10	0.78	-3.45	0.06	-0.03	0.06	0.10	0.15	0.50
		0.19	0.98	-7.05	-0.20	-0.15	0.24	0.00	0.27	0.51
<i>Proportional shift</i>		-0.80	-0.75	2.86	-0.59	-0.47	-0.54	-0.43	-0.61	-0.59
<i>Regional shift</i>		0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85

Hasil pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat dapat memperkuat indikasi sektor unggulan dari hasil analisis LQ sebelumnya yang menunjukkan keunggulan komparatif dan konsistensi keunggulan kompetitif suatu sektor selama kurun waktu 2005-2013. Besaran nilai SSA yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat kurun waktu 2005-2013 sebesar 85%, nilai *regional share* menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi provinsi dan kontribusi rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi terhadap kabupaten/kota. Komponen *proportional shift* menjelaskan bahwa hanya sektor industri pengolahan yang memiliki pertumbuhan positif (2.86), kondisi ini menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi sektor tersebut tumbuh mengikuti aktivitas ekonomi provinsi, berbeda dengan 8 (delapan) sektor lainnya yang memiliki pertumbuhan dibawah pertumbuhan provinsi, hal ini menggambarkan bahwa aktivitas perekonomian sektor-sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan aktivitas ekonomi provinsi.

Suatu sektor diketahui memiliki daya saing dengan wilayah di atasnya (wilayah provinsi) melalui nilai *differential shift*, apabila sektor bersangkutan memiliki nilai lebih dari nol maka sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki kemampuan kompetitif di Provinsi Papua Barat. Hasil analisis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *differential shift* sektor-sektor perekonomian di Provinsi Papua Barat bervariasi pada setiap WP. Sektor perekonomian yang memiliki kemampuan kompetitif pada WP I adalah sektor pertambangan dan penggalian (9.90), sektor industri pengolahan (6.95), sektor jasa-jasa (0.30) serta sektor listrik, gas dan air bersih (0.12). Sektor perekonomian yang memiliki kemampuan kompetitif pada WP II adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (12.14), sektor listrik, gas dan air bersih (3.82), sektor bangunan/konstruksi (3.00), sektor perdagangan, hotel dan restoran (2.55), sektor pertambangan dan penggalian (1.75), sektor pertanian (1.36), sektor angkutan dan komunikasi (0.3). Pada WP

III, sektor yang memiliki kemampuan kompetitif adalah sektor pertambangan dan penggalian (0.98), sektor jasa-jasa (0.51), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0.27), sektor perdagangan, hotel dan restoran (0.24), sektor pertambangan dan penggalian (0.98) dan sektor pertanian (0.19).

Penetapan sektor unggulan wilayah di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan mengkompilasi sektor basis (hasil analisis LQ) dan pertumbuhan sektor perekonomian (hasil SSA) di wilayah Provinsi Papua Barat. Sektor perekonomian dengan nilai $LQ > 1$ dan nilai *differential shift* > 0 ditetapkan sebagai sektor unggulan wilayah secara komparatif maupun kompetitif. Hasil kompilasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sektor Perekonomian Unggulan (Komparatif dan Kompetitif) di Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2005-2013

WP	Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan
I	Manokwari	(1) Bangunan dan konstruksi
		(2) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
		(3) Jasa-jasa
		(4) Listrik, gas dan air bersih
		(5) Angkutan dan komunikasi
		(6) Perdagangan, hotel dan restoran
		(7) Pertanian
		(8) Pertambangan dan penggalian
	Teluk Wondama	(1) Pertanian
		(2) Pertambangan dan pengalihan
		(3) Listrik, gas dan air bersih
		(4) Jasa-jasa
	Teluk Bintuni	(1) Industri pengolahan
		(2) Pertanian
		(3) Pertambangan dan penggalian
II	Kota Sorong	(1) Angkutan dan komunikasi
		(2) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
		(3) Listrik, gas dan air bersih
		(4) Perdagangan, hotel dan restoran
		(5) Bangunan dan konstruksi
		(6) Jasa-jasa
		(7) Pertanian
	Kabupaten Sorong	(1) Pertambangan dan pengalihan
		(2) Industry pengolahan
		(3) Jasa-jasa
		(4) Pertanian
		(5) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
		(6) Bangunan/konstruksi
	Kabupaten Sorong Selatan	(1) Bangunan/Konstruksi
		(2) Pertanian
		(3) Listrik, gas dan air bersih
		(4) Perdagangan, hotel dan restoran
		(5) Jasa-jasa
		(6) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
		(7) Pertambangan/penggalian
	Kabupaten Raja Ampat	(1) Pertambangan dan penggalian
		(2) Pertanian
		(3) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
		(4) Bangunan dan konstruksi

WP	Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan
	Kabupaten Maybrat	(5) Jasa-jasa (1) Pertanian (2) Perdagangan, hotel dan restoran (3) Bangunan dan konstruksi (4) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (5) Pertambangan dan penggalian
	Kabupaten Tambrau	(1) Pertanian (2) Jasa-Jasa (3) Bangunan dan konstruksi (4) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (5) Listrik, gas dan air bersih (6) Perdagangan, hotel dan restoran (7) Pertambangan dan penggalian
III	Kabupaten Fak-Fak	(1) Jasa-Jasa (2) Bangunan dan konstruksi (3) Perdagangan, hotel dan restoran (4) Listrik, gas dan air bersih (5) Angkutan dan komunikasi (6) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (7) Pertanian (8) Pertambangan dan penggalian
	Kabupaten Kaimana	(1) Pertanian (2) Perdagangan, hotel dan restoran (3) Bangunan dan konstruksi (4) Angkutan dan komunikasi (5) Pertambangan dan penggalian (6) Jasa-jasa (7) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (8) Listrik, gas dan air bersih

Implikasi Peranan Sektor Unggulan Sebagai Salah Satu Solusi Atasi Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan pembangunan merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam proses pembangunan suatu wilayah dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemajuan pembangunan ekonomi (Williamson, 1965; Yemtsov, 2005; Elbers et al., 2005), masalah politik dan desentralisasi fiskal (Lessman, 2011), masalah aksesibilitas (Hu, 2002), diskriminasi etnik dan kegagalan pasar (Mills dan Feranti, 1971; Boadway dan Flatters, 1982; Ascani et al., 2012) maupun kepemilikan sumberdaya alam (Venables, 2003). Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan dilakukan pula melalui penanganan terhadap faktor penyebab ketimpangan tersebut dan biasanya bervariasi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Sektor unggulan daerah bukan merupakan faktor mutlak yang dapat menyelesaikan masalah ketimpangan pembangunan wilayah, determinan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan melalui investasi pada *natural capital*, *physical capital*, *human capital* dan *social capital* (Iyer et al., 2005). Salah satu upaya dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat dapat dilakukan melalui investasi pembangunan di sektor-sektor unggulan yang merupakan turunan dari *capital* di atas dan dimiliki oleh kabupaten/kota sesuai dengan kompilasi hasil analisis LQ maupun SSA. Hal ini seperti telah dikemukakan oleh Miranti, R. et al., (2013) bahwa pemetaan sektor-sektor ekonomi potensial di tiap wilayah sangat penting untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan wilayah. Secara keseluruhan, keunggulan sektor pertanian merupakan prioritas

pembangunan di Provinsi Papua Barat sehingga pembangunan sektor unggulan pertanian di daerah diharapkan dapat menjadi pemicu pembangunan (*prime mover*) sektor perekonomian lainnya (*multiplier effect*). Kemajuan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi pada Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni (WP I), Kota Sorong dan Kabupaten Sorong (WP II) disebabkan karena sektor-sektor perekonomian unggulannya terdiversifikasi secara baik dan merata sehingga menyebabkan *backwash effect* yang lebih besar bagi daerah sekitar di dalam wilayah pengembangannya dibandingkan *spreadwash effect*, hal ini berbeda dengan kabupaten lainnya yang merupakan wilayah *hinterland* bagi wilayah-wilayah maju. Ketimpangan yang tinggi pada wilayah maju (Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong) dan wilayah *hinterland* seperti Kabupaten Teluk Wondama di WP I, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat di WP II serta Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana di WP III disebabkan selain karena *backwash effect*, juga disebabkan karena beberapa kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang baru memekarkan diri (Daerah Otonom Baru) dari kabupaten induk sehingga secara finansial belum dapat fokus membiayai investasi pada sektor-sektor unggulannya.

Sektor unggulan di tiap wilayah kabupaten/kota dapat berbeda, pada WP I Kabupaten Manokwari memiliki 7 (tujuh) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Wondama memiliki 4 (empat) sektor perekonomian unggulan dan Kabupaten Teluk Bintuni memiliki 3 (tiga) sektor perekonomian unggulan. WP II, Kota Sorong memiliki 7 (tujuh) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Sorong memiliki 6 (enam) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Sorong Selatan memiliki 7 (tujuh) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Raja Ampat memiliki 5 (lima) sektor perekonomian unggulan dan Kabupaten Tambrauw memiliki 7 (tujuh) sektor perekonomian unggulan. WP III, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana masing-masing memiliki 8 (delapan) sektor perekonomian unggulan. Perbedaan variasi sektor perekonomian unggulan setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat berdampak pada keterkaitan regional secara horizontal sebagai basis pengembangan wilayah. Upaya-upaya dapat terus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota guna mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat dengan mengedepankan keterkaitan wilayah melalui upaya pemerataan investasi dengan prioritas pada sektor-sektor unggulan daerah di semua wilayah secara simultan sehingga infrastruktur wilayah bisa berkembang dan ini berarti kegiatan pada ekonomi basis menjadi *prime mover* yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian wilayah. Upaya investasi seperti yang dikemukakan oleh Sodik dan Nuryadin (2005) dapat dilakukan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Strateginya diarahkan kepada pembangunan wilayah berbasis pada pemanfaatan sumberdaya wilayah baik sektor maupun sub sektor berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif di masing-masing wilayah, didukung pula oleh regulasi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga investor tertarik menanamkan modalnya bagi pengembangan wilayah.

Kesimpulan

- Ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat cenderung mengalami peningkatan selama periode 2005-2013 dan dipengaruhi oleh ketimpangan di dalam WP I dan WP II, sedangkan pada WP III ketimpangannya cenderung konstan. Secara keseluruhan, kabupaten yang berkontribusi besar terhadap ketimpangan pembangunan di dalam wilayah di Provinsi Papua Barat adalah kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Fak-Fak.

- Analisis terhadap sektor-sektor perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di setiap kabupaten/kota menunjukkan hasil yang bervariasi. Kabupaten Manokwari memiliki 8 (delapan) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Teluk Wondama memiliki 4 (empat) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki 3 (tiga) sektor perekonomian unggulan, Kota Sorong memiliki 7 (tujuh) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Sorong memiliki 6 (enam) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Sorong Selatan memiliki 7 (tujuh) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Maybrat memiliki 5 (lima) sektor perekonomian unggulan, Kabupaten Tambrauw memiliki 7 (tujuh) sektor perekonomian unggulan serta Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana masing-masing memiliki 8 (delapan) sektor perekonomian unggulan. Secara keseluruhan, sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan pembangunan di Provinsi Papua Barat dengan rata-rata nilai LQ selama periode 2005-2013 sebesar 1.91.
- Sektor unggulan merupakan salah satu faktor yang dapat berperan sebagai faktor pendorong (*push factor*) bagi sektor-sektor unggulan lainnya agar tumbuh menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan wilayah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan analisis LQ dan SSA terkait potensi sektor-sektor perekonomian unggulan daerah maka pemerintah daerah (*decision maker*) sudah seharusnya mendesain paradigma baru pembangunan wilayah sehingga tercipta pembangunan yang berimbang (*development balance*) antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat.

Daftar Pustaka

- Ascani, A.R.Crescenzi, and S. Iammarino (2012) *Regional Economic Development: A Review. Knowledge Assets: InteRregionally Cohesive NeighBorhoods (SEARCH) within the 7th European Community Framework Programme FP7-SSH-2010.2.2-1 (266834) European Commission.*
- Badan Pusat Statistik (2005) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2006) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2007) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2008) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2009) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2010) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2011) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2012) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2013) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik (2014) Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Bendavid-Val, A. (1991) *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Fourth Edition. Westport, CT: Praeger Publisher.
- Boadway, R., and F. Flatters (1982) Efficiency and Equalization Payments in a Federal System of Government: A Synthesis and Extension of Recent Results. *Canadian Journal of Economics* 15(4), 613-633.
- Elbers, C., P. Lanjouw, J. Mistiaen, B. Ozler, and K.R. Simler (2005) *Are Neighbours Equal? Estimating Local Inequality in Three Developing Countries*. In R. Kanbur and A. Venables (editors), *Spatial Inequality and Development*, 37-76. New York: Oxford University Press.
- Hu, D. (2002) Trade, rural-urban migration, and regional income disparity in developing countries: a spatial general equilibrium model inspired by the case of China. *Regional Science and Urban Economics*, 32(2002), 311-338.
- Iyer, S., M. Kitson, B. Toh (2005) Social Capital, Economic Growth and Regional Development. *Regional Studies* 39(8), 1015-1040.

- James, W.E., and O. Movshuk (2003) Comparative Advantage In Japan, Korea and Taiwan Between 1980 and 1999: Testing for Convergence and Implication for Closer Economic Relation. *The Developing Economies*, XLI (3), 287-308.
- Kay, D.L., J.E. Pratt, and M.E. Warner (2007) Role of Services in Regional Economy Growth. *Growth and Change* 38(3), 419-442.
- Kimura, E. (2007) *Marginality and Opportunity in The Periphery: the Emergence of Gorontalo Province in North Sulawesi Indonesia*: Modern Indonesia Project Cornell University (84), 71-95.
- Kurian, N.J. (2007) Widening Economic and Social Disparities: Implications for India. *Indian Journal of Medical Research* 126(4), 374.
- Lessmann, C. (2011) *Regional Inequality and Decentralization. An Empirical Analysis*. Technische Universit at Dresden.
- Matsui, K. (2005) Post-Decentralization Regional Economies and Actors: Putting the Capacity of Local Governments to The Test. *The Developing Economies* XLIII(1), 171-189.
- Mills, E.S., and D.M. d. Ferranti (1971) Market Choices and Optimum City Size. *American Economic Review* 61(2), 340-345.
- Miranti, R. et al.(2013) "Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 148, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5k43bvt2dwjk-en>.
- Rauch, T., M. Bartels, and A. Engel (2001) *Regional Rural Development. A Regional Response to Rural Poverty*. Universum Verlagsanstalt GmbH KG. Wiesbaden.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim, dan D.R. Panuju (2009) *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Sodik, J., dan D. Nuryadin (2005) Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10(2), Agustus 2005, 157-170.
- Sjafrizal, (2008) *Ekonomi Regional*. Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang Sumatera Barat.
- Swastyardi, D. (2008) *Regional Inequality in Indonesia: Is the General Allocation Fund (DAU) Likely To Have An Impact?* A Research Paper, in partial fulfillment of the requirements for obtaining the degree of Masters of Arts In Development Studies. The Hague, The Netherlands.
- Tarigan, R. (2005) *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M.P., and S.C. Smith (2009) *Economic Development*. Tenth Edition. Boston, MA: Pearson Addison Wesley.
- Venables, A.J. (2003) *Spatial Disparities in Developing Countries: Cities, Regions and International Trade*. Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science. Houghton Street London WC2A 2AE. Diperoleh dari http://eprints.lse.ac.uk/2038/1/Spatial_Disparities_in_Developing_Countries_Cities_Regions_and_International_Trade.pdf. Diakses pada tanggal 5 Maret 2016
- Williamson, J.G. (1965) Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of Patterns. *Economic Development and Cultural Change* 13(4), 3-45.
- Xu, J., N. Ai, Y. Lu, Y. Chen, and L. Yiying (2004) Regional Economic Disparities in China and Their Evolution from 1952 to 2000: Evidence by Theil Coefficient Based on Comparable Prices. *Advances in Spatial Analysis and Decision Making*, 155-165.
- Yemtsov, R. (2005) Quo Vadis? Inequality and Poverty Dynamics across Russian Regions. In R. Kanbur and A. Venables (editors), *Spatial Inequality and Development*, pp. 348-408. New York: Oxford University Press.